



RENCANA KINERJA TAHUNAN



2025

**BPPMHKP
AMBON**

KATA PENGANTAR

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang. Dalam menghadapi dinamika pasar dan kemajuan teknologi yang pesat, kami menyadari bahwa pencapaian tujuan jangka panjang hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah. Oleh karena itu, rencana kerja ini disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Balai KIPM Ambon menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB Kapal, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, dan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Ambon Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2025. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2025 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai KIPM Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2025. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Ambon di tahun kedepannya.

Demikian RKT Balai KIPM Ambon Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Ambon, 31 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Hatta Arisandi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Tugas dan Peran Organisasi.....	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi	10
Arah Kebijakan	13
Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja	13
Penutup	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2024	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2025	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Ambon tahun 2025	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan. Di dalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Ambon 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BPPMHKP menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di

pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai KIPM Ambon sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Balai KIPM Ambon cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Ambon Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Ambon pada tahun 2025

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Ambon dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Ambon adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Ambon tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Ambon pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.



Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan



Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

- 
1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6

(enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP

5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai KIPM Ambon telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Ambon telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	86
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		9	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai KIPM Ambon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu

antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Balai KIPM BPPMHKP tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai KIPM Ambon tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 5.139.697.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Ambon untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Ambon Ambon Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	4.731.697.000
2.	Manajemen Mutu	183.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	225.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2025		5.139.697.000

Penutup

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPMHKP Ambon Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor pembangunan masyarakat dan lingkungan. Penyusunan rencana ini mengacu pada visi, misi, serta program prioritas yang telah ditentukan, serta memperhatikan dinamika dan tantangan yang ada.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini tidak hanya bergantung pada komitmen dan kerja keras internal, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan semangat kerja sama yang solid, kami optimis bahwa setiap langkah yang diambil dalam RKT ini akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ambon.

Semoga tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan capaian yang signifikan, kemajuan yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh warga Ambon.

**LAMPIRAN RENCANA
KINERJA TAHUN
BPPMHKP AMBON
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.731.697.000
2.	Manajemen Mutu	183.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	225.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2025		5.139.697.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			408,000,000	
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			225,000,000	
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		5,000,000	
3989.BIA.001	Lokasi : KOTA AMBON	1.0 Produk		5,000,000	
051	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya			5,000,000	U
A	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			5,000,000	
521211	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			500,000	A
	Belanja Bahan			500,000	
	(KPPN.061-Ambon)				
	- ATK dan Komputer Suplies	1.0 Paket	500,000	500,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4,500,000	A
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Tiket PP [2 ORG x 1 Lok]	2.0 OK	210,000	420,000	*
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 Lok]	6.0 OK	380,000	2,280,000	*
	- Penginapan [2 ORG x 1 Lok x 2 HR]	4.0 OH	450,000	1,800,000	*
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	30.0 produk, Sertifikat		90,000,000	
3989.PDC.002	Lokasi : KOTA AMBON	30.0 produk		90,000,000	
051	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi			90,000,000	U
A	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			30,000,000	
524111	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan			30,000,000	A
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000	
	(KPPN.061-Ambon)				
	> Perjalanan Inspeksi/Verifikasi dalam rangka SPDI			30,000,000	
	- Tiket PP [1 ORG x 7 Lok]	7.0 OK	800,000	5,600,000	*
	- Uang Harian [1 ORG x 3 Hr x 7 Lok]	21.0 OK	380,000	7,980,000	*
	- Penginapan [1 ORG x 2 HR x 7 Lok]	14.0 OH	400,000	5,600,000	*
	- Taksi [1 ORG x 1 KEG]	1.0 PKT	820,000	820,000	*
	>> Perjalanan Sosialisasi SPDI			10,000,000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	6,000,000	6,000,000	*
	- Penginapan [1 ORG x 3 HR x 0 Lok]	3.0 OH	600,000	1,800,000	*
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HR]	4.0 PKT	400,000	1,600,000	*
	- Taksi PP [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	600,000	600,000	*
B	Sertifikasi Kelayakan Pengelolaan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar			29,563,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon)			29,563,000	A
	- Uang Harian [4 Org x 5 HR]	20.0 OH	380,000	7,600,000	*
	- Penginapan [4 Org x 3 HR]	12.0 OH	600,000	7,200,000	*
	- Taksi PP [4 ORG x 1 KEG]	4.0 OK	800,000	3,200,000	*
	- Tiket PP	1.0 OK	11,563,000	11,563,000	*
C	<i>Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI</i>			30,437,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon)			12,437,000	A
	> Inspeksi/Verifikasi/Surveilan HACCP			12,437,000	
	- Taksi	1.0 OK	3,437,000	3,437,000	*
	- Uang Harian [2 Org x 5 HR]	10.0 OH	380,000	3,800,000	*
	- Penginapan [2 Org x 3 HR]	6.0 OH	600,000	3,600,000	*
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2.0 OK	800,000	1,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.061-Ambon)			18,000,000	
	- Perjalanan Dinas Lokal [2 ORG x 5 KEG x 12 BLN]	120.0 OK	150,000	18,000,000	
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	1.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		115,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA AMBON				
051	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	1.0 Lembaga		115,000,000	
A	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			115,000,000	U
	<i>Sertifikasi/Surveilan CBIB pada Pembudidayaan Ikan</i>			30,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon)			30,000,000	A
	- Tiket PP [2 OK x 1 KEG x 2 Lok]	4.0 OK	3,179,000	12,716,000	*
	- Taksi PP [2 ORG x 1 KEG x 2 Lok]	4.0 KL	800,000	3,200,000	*
	- Uang Harian [2 ORG x 4 Hr x 2 Lok]	16.0 HR	380,000	6,080,000	*
	- Penginapan [2 ORG x 3 HR x 2 Lok]	12.0 OH	667,000	8,004,000	*
B	<i>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</i>			5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon)			5,000,000	
	- Uang Harian [1 ORH x 4 HR]	4.0 OH	380,000	1,520,000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HR]	3.0 OH	600,000	1,800,000	
	- Taksi PP [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	600,000	600,000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	1,080,000	1,080,000	
C	<i>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan (10 Kapal)</i>			50,000,000	
					RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [2 OK x 1 KEG x 3 Lok] - Taksl PP [2 ORG x 1 KEG x 3 Lok] - Uang Harian [2 ORG x 5 Hr x 3 Lok] - Penginapan [2 ORG x 4 HR x 3 Lok]	 6.0 OK 6.0 KL 30.0 HR 24.0 OH	 3,433,450 600,000 380,000 600,000	50,000,000 20,600,000 3,600,000 11,400,000 14,400,000	A * * * *	PNP
D	<u>Monitoring Cemaran Perairan</u>			10,000,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 Lok] - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 Lok] - Taksi PP [2 ORG x 1 Lok] - Tiket PP [2 ORG x 1 LOK]	 6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK 2.0 OK	 380,000 500,000 500,000 2,360,000	10,000,000 2,280,000 2,000,000 1,000,000 4,720,000		RM
E	<u>Bimtek TOT CBIB</u>			20,000,000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian Full [2 ORG x 2 HR] - Uang Harian Fullboard [2 ORG x 3 HR] - Penginapan [2 ORG x 3 HR] - Taksi PP [1 ORG x 2 KL] - Tiket PP [1 ORG x 2 KL]	 4.0 OH 6.0 OH 6.0 OH 2.0 OK 2.0 OK	 530,000 150,000 600,000 800,000 5,890,000	20,000,000 2,120,000 900,000 3,600,000 1,600,000 11,780,000	A * * * * *	PNP
3989.QIC	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</u>	15.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		15,000,000		
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA AMBON <u>UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</u>	15.0 Lembaga		15,000,000		
051	<u>UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</u>			15,000,000	U	
A	<u>Verifikasi dan Evaluasi Kesesuaian</u>			5,690,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian [1 ORG x 3 HR] - Penginapan [1 ORG x 2 HR] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	 3.0 OH 2.0 OH 1.0 OK 1.0 OK	 380,000 600,000 600,000 2,750,000	5,690,000 1,140,000 1,200,000 600,000 2,750,000	A * * * *	PNP
B	<u>Temu Teknis</u>			9,310,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649750) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI Rp. 5,139,697,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian Full [1 ORG x 2 OH] - Uang Harian Fullboard [1 ORG x 3 OH] - Penginapan [1 ORG x 2 HR] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	2.0 OH 3.0 OH 2.0 OH 1.0 OK 1.0 OK	530,000 150,000 600,000 600,000 6,000,000	9,310,000 1,060,000 450,000 1,200,000 600,000 6,000,000	A * * * * *	PNP
7010	Manajemen Mutu			183,000,000		
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		10,000,000		
7010.ABR.001	Lokasi : KOTA AMBON					
051	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	1.0 Rekomendasi Kebijakan		10,000,000	U	
A	Perjalanan Harmonisasi Persyaratan atau ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor			10,000,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian Full [1 ORG x 2 HR] - Uang Harian Fullboard [1 ORG x 3 HR] - Penginapan [1 ORG x 3 HR] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]			10,000,000 1,060,000 450,000 1,800,000 800,000 5,890,000	A * * * * *	
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Orang, Kegiatan		9,000,000		
7010.DCC.001	Lokasi : KOTA AMBON					
051	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan Peningkatan kompetensi inspektur mutu	1.0 Kegiatan		9,000,000	U	
A	Perjalanan Peningkatan kompetensi inspektur mutu			9,000,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.061-Ambon) - Uang Harian Full [1 ORG x 2 HR] - Uang Harian Fullboard [1 ORG x 2 HR] - Penginapan [1 ORG x 3 HR] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]			9,000,000 1,060,000 300,000 1,800,000 800,000 5,040,000	A * * * * *	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		95,000,000		
7010.PBR.001	Lokasi : KOTA AMBON					
051	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		95,000,000	U	
A	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ISO 17025			40,500,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649750)

Rp. 5,139,697,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon) - Iuran Tahunan ISO 17025 - Biaya Pendaftaran - Biaya Surveilans [2 ORG x 2 HR]	1.0 PKT 1.0 PKT 4.0 OH	1,500,000 5,000,000 3,500,000	20,500,000 1,500,000 5,000,000 14,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [2 ORG x 1 KEG] - Taksi PP [2 ORG x 1 KEG] - Penginapan [2 OEG x 2 HR] - Uang Harian [2 ORG x 3 HR]			20,000,000 12,920,000 2,000,000 2,800,000 2,280,000	A
B	Sistem Pengujian Laboratorium			7,500,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon) - Uji Banding - Uji Profesiensi	2.0 PKT 3.0 PKT	1,500,000 1,500,000	7,500,000 3,000,000 4,500,000	
C	Kalibrasi			47,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon) - Biaya Kalibrasi	1.0 PKT	47,000,000	47,000,000	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga, Unit Kerja		60,000,000	
7010.PDD.001	Lokasi : KOTA AMBON Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000	U
A	Sertifikasi ISO 9001			25,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon) - Iuran Tahunan ISO 9001 - Biaya Pendaftaran - Biaya Surveilans [1 ORG x 2 HR]	1.0 PKT 1.0 PKT 2.0 PKT	1,500,000 5,000,000 3,500,000	13,500,000 1,500,000 5,000,000 7,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Penginapan [1 ORG x 3 HR] - Uang Harian [1 ORG x 4 HR]	1.0 OK 1.0 OK 3.0 OH 4.0 OH	6,880,000 1,000,000 700,000 380,000	11,500,000 6,880,000 1,000,000 2,100,000 1,520,000	
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		35,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			35,000,000	U
A	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ISO 17020			35,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649750) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI Rp. 5,139,697,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon) - Biaya pertanggung gugatan - Iuran Tahunan ISO 17020 - Biaya Surveilans [2 ORG x 2 HR]	1.0 PKT 1.0 PKT 4.0 OH	1,500,000 1,500,000 3,500,000	17,000,000 1,500,000 1,500,000 14,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [2 ORG x 1 KEG] - Taksi PP [2 ORG x 1 KEG] - Penginapan [2 ORG x 2 HR] - Uang Harian [2 ORG x 3 HR]	2.0 OK 2.0 OK 4.0 OH 6.0 OH	5,660,000 800,000 700,000 380,000	18,000,000 11,320,000 1,600,000 2,800,000 2,280,000	A
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		9,000,000	
7010.QIA.001	Lokasi : KOTA AMBON Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		9,000,000	
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			9,000,000	U
A	Perjalanan Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance di Kota Tual			9,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Penginapan [1 ORG x 5 HR] - Uang Harian [1 ORG x 6 HR]	1.0 OK 1.0 OK 5.0 OH 6.0 OH	3,000,000 720,000 600,000 380,000	9,000,000 3,000,000 720,000 3,000,000 2,280,000	A
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			4,731,697,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			4,731,697,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,633,302,000	
3987.EBA.962	Lokasi : KOTA AMBON Layanan Umum	1.0 Layanan		128,395,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			128,395,000	
A	Uji Kompetensi Pejabat Fungsional			49,800,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [1 ORG x 4 Keg] - Penginapan [1 ORG x 4 HR x 4 KEG] - Uang Harian Full [1 ORG x 2 HR x 4 Keg] - Uang Harian Fullboard [1 ORG x 5 HR x 4 Keg] - Taksi PP [1 ORG x 4 Keg]	4.0 OK 16.0 OH 8.0 HR 20.0 HR 4.0 OK	7,000,000 700,000 530,000 150,000 840,000	49,800,000 28,000,000 11,200,000 4,240,000 3,000,000 3,360,000	A
					RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649750)

Rp. 5,139,697,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Penyusunan Dokumen WBK/WBBM			3,895,000	
521211	Belanja Bahan			3,895,000	RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- ATK/Spanduk/stiker/XBanner	1.0 PKT	3,895,000	3,895,000	
C	Koordinasi/Konsultasi Lingkup BKIPM			38,694,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			38,694,000	RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Tiket PP [1 ORG x 4 Keg]	4.0 OK	4,750,000	19,000,000	
	- Penginapan [1 ORG x 6 HR x 2 KEG]	12.0 OH	700,000	8,400,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 8 HR x 2 Keg]	16.0 HR	530,000	8,480,000	
	- Uang Harian Fullboard	1.0 HR	414,000	414,000	
	- Taksi PP [1 ORG x 4 Keg]	4.0 OK	600,000	2,400,000	
D	Rapat Ketatausahaan lingkup BKIPM			36,006,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			36,006,000	A RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Tiket PP [1 ORG x 4 Keg]	4.0 OK	6,039,000	24,156,000	*
	- Penginapan [1 ORG x 4 HR x 2 KEG]	8.0 OH	700,000	5,600,000	*
	- Uang Harian Full [1 ORG x 2 HR x 2 Keg]	4.0 HR	530,000	2,120,000	*
	- Uang Harian Fullboard [1 ORG x 3 HR x 4 Keg]	12.0 HR	150,000	1,800,000	*
	- Taksi PP [1 ORG x 2 Keg]	2.0 OK	1,165,000	2,330,000	*
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,504,907,000	
001	Gaji dan Tunjangan			2,597,893,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS			2,228,887,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			676,003,000	RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	12.0 BLN	49,480,000	593,760,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	41,194,000	41,194,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	41,049,000	41,049,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			22,000	RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	600	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	600	1,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			56,545,000	RM
	(KPPN.061-Ambon)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12.0 BLN	4,142,000	49,704,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,428,000	3,428,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,413,000	3,413,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			23,785,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	12.0 BLN	1,754,000	21,048,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,371,000	1,371,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,366,000	1,366,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			39,672,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	12.0 BLN	2,916,000	34,992,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,340,000	2,340,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,340,000	2,340,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			35,954,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.0 BLN	2,717,000	32,604,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,675,000	1,675,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,675,000	1,675,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			6,005,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	12.0 BLN	150,000	1,800,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,128,000	2,128,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,077,000	2,077,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			50,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			110,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	110,000,000	110,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.061-Ambon)			9,750,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	12.0 BLN	720,000	8,640,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	555,000	555,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	555,000	555,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.061-Ambon)			268,849,000	RM
	- Belanja Uang Lembur	1.0 THN	268,849,000	268,849,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.061-Ambon)			952,302,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai	1.0 THN	952,302,000	952,302,000	
B	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</i>			369,006,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			120,000,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	120,000,000	120,000,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			20,000	RM
	- Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	20,000	20,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			8,000,000	RM
	- Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	8,000,000	8,000,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			3,000,000	RM
	- Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			100,000	RM
	- Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	100,000	100,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			8,000,000	RM
	- Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	8,000,000	8,000,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			20,112,000	RM
	- Uang Makan PPPK	1.0 THN	20,112,000	20,112,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			100,000	RM
	- Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	100,000	100,000	
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			40,000,000	RM
	- Belanja Uang Lembur PPPK	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.061-Ambon)			169,674,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	169,674,000	169,674,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,907,014,000	U
A	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>268,313,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.061-Ambon)			39,969,000	A RM
	- Internet BPPMHKP Ambon	12.0 BLN	1,600,000	19,200,000	
	- Paket zoom, Canva, Domain	1.0 THN	4,955,000	4,955,000	
	- Internet Satpel Saumlaki	12.0 BLN	340,000	4,080,000	*
	- Internet Satpel Tual	10.0 BLN	393,400	3,934,000	*
	- Internet Satpel Dobo	12.0 BLN	650,000	7,800,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649750)

Rp. 5,139,697,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.061-Ambon) - Listrik Lingkup Balai KIPM Ambon - Listrik Satpel Bandara Tual	12.0 BLN 1.0 BLN	14,995,000 1,004,000	180,944,000 179,940,000 1,004,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.061-Ambon) - Telepon Lingkup Balai KIPM Ambon	12.0 BLN	3,650,000	43,800,000 43,800,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.061-Ambon) - Langganan Air	12.0 BLN	300,000	3,600,000 3,600,000	RM
B	<i>Perawatan Kendaraaan Bermotor Roda 4</i>			159,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon) - Pengurusan STNK/Pajak Kendaraan Roda 4	4.0 UNIT	4,500,000	18,000,000 18,000,000	A *
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.061-Ambon) - Perawatan Kendaraan Roda 4	4.0 UNIT	35,250,000	141,000,000 141,000,000	A *
C	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2</i>			36,300,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon) - Pengurusan STNK/Pajak Kendaraan Roda 2	11.0 UNIT	300,000	3,300,000 3,300,000	A *
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.061-Ambon) - Perawatan Kendaraan Roda 2	11.0 UNIT	3,000,000	33,000,000 33,000,000	A *
D	<i>Perawatan Gedung Kantor</i>			428,835,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.061-Ambon) > Satker Ambon - Pemeliharaan Gedung Kantor BPPMHKP Ambon - Pemeliharaan Halaman Kantor BPPMHKP Ambon - Pemeliharaan Gedung Laboratorium BPPMHKP Ambon - Pemeliharaan Halaman Laboratorium BPPMHKP Ambon - Pemeliharaan Gedung Instalasi Lainnya - Pemeliharaan Gedung Kantor Tual - Pemeliharaan Gedung Kantor Dobo - Pemeliharaan Halaman Kantor Dobo - Pemeliharaan Gedung Kantor Saumlaki - Pemeliharaan Halaman Kantor Saumlaki - Pemeliharaan Pagar Permanen BPPMHKP Ambon - Perbaikan Sarana Ruang Rapat	 777.0 M2 218.0 M2 201.0 M2 50.0 M2 82.0 M2 201.0 M2 201.0 M2 500.0 M2 477.0 M2 300.0 M2 300.0 M2 1.0 PKT	 197,000 14,000 197,000 14,000 197,000 197,000 197,000 14,000 197,000 14,000 73,000 10,000,000	428,835,000 428,835,000 153,069,000 3,052,000 39,597,000 700,000 16,154,000 39,597,000 39,597,000 7,000,000 93,969,000 4,200,000 21,900,000 10,000,000	A *<	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649750) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI Rp. 5,139,697,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.061-Ambon)			87,120,000	RM
	> Honor Pengelola Anggaran			87,120,000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,550,000	18,600,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,510,000	18,120,000	
	- Pejabat Penguji SPM	12.0 BLN	600,000	7,200,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	520,000	6,240,000	
	- Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	390,000	9,360,000	
	- Staf Pengelola Gaji [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	390,000	4,680,000	
	- Atasan Langsung Bendahara PNPB	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Bendahara PNPB	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	>> Honor Pengelola SAI		0	12,000,000	
	- Penanggung Jawab	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Koordinator	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Ketua	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Wakil Ketua	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Anggota [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	150,000	3,600,000	
	>> Honor Pengurus/Penyimpan BMN		0	4,320,000	
	- Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			7,206,000	RM
	- Pencetakan Form Lab, spanduk	1.0 THN	7,206,000	7,206,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.061-Ambon)			8,160,000	A RM
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.0 BLN	680,000	8,160,000	*
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.061-Ambon)			10,000,000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			258,065,000	A RM
	> Biaya Pengiriman Barang			258,065,000	
	- Biaya Pengiriman Barang	1.0 THN	4,500,000	4,500,000	*
	- Biaya Pembuatan Video PPID	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
	- Biaya Publikasi Media Digital	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	>> Tenaga PJLP		0	247,065,000	
	- Honor Tenaga PJLP [5 ORG x 13 BLN]	65.0 OB	3,801,000	247,065,000	*
F	<u>Pengadaan Pakaian Dinas ASN</u>			20,832,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			20,832,000	A RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan PPPK [14 Peg x 2 Stel]	28.0 ORG	744,000	20,832,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Pengadaan Pakaian Dinas PPNPN dan PJLP			20,832,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.061-Ambon)			20,832,000	A RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas PPNPN [7 Peg x 2 Stell]	14.0 ORG	744,000	10,416,000	*
	- Pengadaan Pakaian Dinas PJLP [7 Peg x 2 Stell]	14.0 ORG	744,000	10,416,000	*
H	Pengadaan Makanan, Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh			13,440,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.061-Ambon)			13,440,000	A RM
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh [14 ORG x 4 KL x 12 bln]	672.0 OH	20,000	13,440,000	*
I	Pas Pelabuhan Laut dan Udara			4,578,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.061-Ambon)			4,578,000	A RM
	- Pembuatan ID Card/Pas Bandara/Pelabuhan/Kantor	1.0 PKT	4,578,000	4,578,000	*
J	Jamuan Tamu			87,000,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.061-Ambon)			87,000,000	A RM
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	87,000,000	87,000,000	*
K	Pemeliharaan Peralatan Kantor			83,740,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.061-Ambon)			83,740,000	A RM
	- Pemeliharaan AC Sentral	6.0 UNIT	1,000,000	6,000,000	*
	- Pemeliharaan AC Split	30.0 UNIT	610,000	18,300,000	*
	- Pemeliharaan PC UNIT	18.0 UNIT	730,000	13,140,000	*
	- Pemeliharaan Laptop	15.0 UNIT	700,000	10,500,000	*
	- Pemeliharaan Printer	20.0 UNIT	690,000	13,800,000	*
	- Pemeliharaan Genset	5.0 UNIT	2,900,000	14,500,000	*
	- Pemeliharaan Jaringan listrik	1.0 UNIT	5,500,000	5,500,000	*
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.0 UNIT	1,000,000	2,000,000	*
L	Perlengkapan Laboratorium dan Pelayanan			37,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.061-Ambon)			37,200,000	A RM
	- Perlengkapan Pelayanan	12.0 BLN	1,750,000	21,000,000	*
	- Perlengkapan Laboratorium	12.0 BLN	1,350,000	16,200,000	*
M	Medical Checkup			3,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.061-Ambon)			3,000,000	A RM
	- Belanja Medical Checkup	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	*
N	Perbaikan Papan Nama Kantor			5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			5,000,000	A
	- Perbaikan Papan Nama Kantor	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	*
O	<u>Kegiatan Insidentil</u>			7,500,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.061-Ambon)			7,500,000	A
	- Sewa Kendaraan Insidentil	1.0 Keg	7,500,000	7,500,000	*
P	<u>Forum Komunikasi Publik</u>			14,224,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			8,000,000	
	- Sarana Pelayanan publik	1.0 PKT	8,000,000	8,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			5,224,000	
	- ATK	1.0 PKT	204,000	204,000	
	- Konsumsi	50.0 ORG	60,000	3,000,000	
	- Snack	50.0 ORG	25,000	1,250,000	
	- Spanduk	1.0 PKT	770,000	770,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.061-Ambon)			1,000,000	
	- Honor Narasumber	2.0 OJ	500,000	1,000,000	
3987.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		98,395,000	
	Lokasi : KOTA AMBON				
3987.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		68,037,000	
051	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>			68,037,000	U
A	<u>Rekonsiliasi SAI dan SABMN</u>			42,337,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			737,000	A
	- ATK dan Komputer Suplies	1.0 PKT	737,000	737,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.061-Ambon)			41,600,000	A
	> Rekon SAI Semester I dan II			41,600,000	
	- Tiket PP [2 ORG x 2 Keg]	4.0 OK	5,690,000	22,760,000	*
	- Taksi PP [2 ORG x 2 KEG]	4.0 OK	800,000	3,200,000	*
	- Uang Harian Full [2 OK x 2 HR x 2 Keg]	8.0 OH	530,000	4,240,000	*
	- Uang Harian Fullboard [2 OK x 3 HR x 2 Keg]	12.0 OH	150,000	1,800,000	*
	- Penginapan [2 ORG x 4 MLM x 2 Keg]	16.0 OH	600,000	9,600,000	*
B	<u>Rapat Penyusunan Program dan Anggaran 2026</u>			25,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649750)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
ALOKASI	Rp. 5,139,697,000	

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.061-Ambon)			25,700,000	A	RM
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2.0 OK	6,540,000	13,080,000	*	
	- Taksi PP [2 OR x 2 KEG]	4.0 OK	800,000	3,200,000	*	
	- Penginapan [2 ORG x 4 HR]	8.0 HR	800,000	6,400,000	*	
	- Uang Harian Full [2 ORG x 2 HR]	4.0 HR	530,000	2,120,000	*	
	- Uang Harian Fullboard [2 ORG x 3 HR]	6.0 HR	150,000	900,000	*	
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		30,358,000		
051	Layanan Manajemen Keuangan			30,358,000		
A	Penyusunan Laporan Tahun			3,500,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			3,500,000	A	PNP
	- ATK	1.0 PKT	500,000	500,000	*	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	*	
	- Penggandaan Laporan	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	*	
B	Penyusunan LAKIP			6,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			6,000,000	A	PNP
	- ATK [1 PKT x 4 TW]	4.0 PKT	500,000	2,000,000	*	
	- Komputer Supplies [1 PKT x 4 TW]	4.0 PKT	500,000	2,000,000	*	
	- Penggandaan Laporan [1 LAP x 4 TW]	4.0 PKT	500,000	2,000,000	*	
C	Penyusunan Renstra			2,500,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			2,500,000	A	PNP
	- ATK	1.0 PKT	500,000	500,000	*	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	*	
	- Penggandaan Laporan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	*	
D	Laporan Keuangan			3,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			3,000,000	A	PNP
	- ATK [1 ATK x 2 SMS]	2.0 PKT	500,000	1,000,000	*	
	- Komputer Supplies [1 PKT x 2 SMS]	2.0 PKT	500,000	1,000,000	*	
	- Penggandaan Laporan [1 LAP x 2 SMS]	2.0 PKT	500,000	1,000,000	*	
E	Penyusunan Buku BPPMHKP Dalam Angka			4,138,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.061-Ambon)			4,138,000	A	PNP
	- ATK	1.0 PKT	500,000	500,000	*	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	*	
	- Penggandaan Laporan	1.0 PKT	2,638,000	2,638,000	*	
F	Penyusunan Laporan RKABMN			11,220,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(032)

(13)

(649750)

Rp. 5,139,697,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.061-Ambon) - Tiket PP [1 ORG x 1 KEG] - Taksi PP [1 ORG x 1 KEG] - Penginapan [1 ORG x 3 HR] - Uang Harian Fullboard [1 ORG x 3 HR] - Uang Harian Full [1 ORG x 2 HR]	1.0 OK 1.0 KL 3.0 HR 3.0 HR 2.0 HR	6,610,000 1,000,000 700,000 150,000 530,000	11,220,000 6,610,000 1,000,000 2,100,000 450,000 1,060,000	A * * * * *
					PNP

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

Ambon, 19 September 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN,PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

A. RENCANA KINERJA PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER DAN PUSAT MUTU PASCA PANEN

1. KEMETERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
3. UNIT ORGANISASI ESELON 2) : Pusat Mutu Produksi Primer dan Pusat Mutu Pasca Panen
4. UNIT KERJA : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
5. PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6. KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

7. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025
01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan		225.000.000
01.01	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70%	
01.02	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70%	
01.03	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99%	
Total			225.000.000

8. RINCIAN KEGIATAN

a. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		5.000.000
3989.BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya										5.000.000
	051- Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan										5.000.000
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		90.000.000
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi										90.000.000
	051 - Validasi produk pada sektor produksi pasca panen										90.000.000
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		115.000.000
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi										115.000.000
	051 - Validasi Sertifikasi Produksi Primer										115.000.000
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		15.000.000
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										15.000.000
	051 - UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										15.000.000
Total											225.000.000

b. PEHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PERKIRAAN KEBUTUHAN						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP)	VOLUME / TARGET			ALOKASI		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]										
3989.BIA.001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya										
051	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	1	Produk	5.000.000	5.000.000	1	1	1	6.250.000	7.500.000	8.750.000
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]										
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi										
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen	30	Produk	3.000.000	90.000.000	30	35	40	112.500.000	135.000.000	157.500.000
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]										
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi										
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer	1	Lembaga	115.000.000	115.000.000	1	1	1	143.750.000	172.500.000	201.250.000

3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]												
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15	Lembaga	1.000.000	15.000.000	15	15		18	18.750.000	22.500.000	26.250.000	
Total					225.000.000					281.250.000	337.500.000	393.750.000	

[illegible]

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA | : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) | : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |
| 3. UNIT ORGANISASI ESELON 2) | : Pusat Manajemen Mutu |
| 4. UNIT KERJA | : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon |
| 5. PROGRAM | : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri |
| 6. KEGIATAN | : Manajemen Mutu |

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025
02	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar		183.000.000
02.01	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75	
02.02	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75	
Total			183.000.000

a. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025				PERKIRAAN KEBUTUHAN					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025	VOLUME / TARGET			ALOKASI		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]										
7010.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan										
051	Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	1	Rekomendasi	10.000.000	10.000.000	1	1	1	14.000.000	17.000.000	19.000.000
7010.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]										
7010.DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan										
051	Peningkatan kompetensi inspektur mutu	1	Kegiatan	9.000.000	9.000.000	1	1	1	12.600.000	15.300.000	17.100.000
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]										
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan										
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji	1	Rekomendasi	95.000.000	95.000.000	1	1	1	133.000.000	161.500.000	180.500.000
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]										
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	2	Lembaga		60.000.000	2	2	2	84.000.000	102.000.000	114.000.000
051	Penerapan Standar Metode Pengujian	1	Lembaga	25.000.000	25.000.000	1	1	1	35.000.000	42.500.000	47.500.000
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium										
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	1	Lembaga	35.000.000	35.000.000	1	1	1	49.000.000	59.500.000	66.500.000
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]										
7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi										
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance	1	Layanan	9.000.000	9.000.000	1	1	1	12.600.000	15.300.000	17.100.000
	Total				243.000.000				340.200.000	413.100.000	461.700.000

[illegible]

C. RENCANA KINERJA SEKRETRIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. KEMETERIAN/LEMBAGA	: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)	: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
3. UNIT ORGANISASI ESELON 2)	: Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
4. UNIT KERJA	: Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
5. PROGRAM	: Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6. KEGIATAN	: Dukungan Manajerial

7. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025
03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		4.731.697.000
03.01	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	92	
03.02	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71,5	
03.03	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100	
03.04	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	87	
03.05	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	86	
03.06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85	
03.07	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76	
03.08	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	
03.09	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88	
Total			4.731.697.000

8. RINCIAN KEGIATAN

a. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJİ PRESİDEN	ALOKASI
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		4.633.302.000
3987.EBA.962	Layanan Umum										128.395.000
	051 - Layanan Umum dan Rumah Tangga										128.395.000
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran										4.504.907.000
	001 - Gaji dan Tunjangan										2.597.893.000
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Maluku	Ambon						Bukan Tematik		1.907.014.000
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal(Base Line)										98.395.000
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										68.037.000
	051 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran										68.037.000
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										30.358.000
	051 - Layanan Manajemen Keuangan										30.358.000
Total											4.731.697.000

b. PEHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025				PERKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025	VOLUME / TARGET			ALOKASI		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)										
3987.EBA.962	Layanan Umum										
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga	1	Layanan	128.395.000	128.395.000	1	1	1	141.234.500	147.654.250	166.913.500
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran										
001	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	2.597.893.000	2.597.893.000	1	1	1	2.857.682.300	2.987.576.950	3.377.260.900
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.907.014.000	1.907.014.000	1	1	1	2.097.715.400	2.193.066.100	2.479.118.200
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal(Base Line)										
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	68.037.000	68.037.000	1	1	1	74.840.700	78.242.550	88.448.100
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										
051	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	30.358.000	30.358.000	1	1	1	33.393.800	34.911.700	39.465.400
Total					4.731.697.000				4.731.697.000	5.441.451.550	6.151.206.100

c. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUT PUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										TOTAL
			RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)												
3987.EBA.962	Layanan Umum												
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga	Pendukung	128.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.395.000
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran												
001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	2.597.893.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.597.893.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	1.907.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907.014.000
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal(Base Line)												
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pendukung	68.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.037.000
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan												
051	Layanan Manajemen Keuangan	Pendukung	0	30.358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.358.000
Total			4.701.339.000	30.358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.731.697.000



Kepala Balai,

 Muhammad Hatta Arisandi
 NIP. 19800327 200312 1 001